



Buletin

Isen Mulang

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Edisi. 298
Agustus 2019



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Mulyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

Grand Design Kalteng 2045 Sasar Pengembangan Potensi dan Keunggulan Daerah	3
Wagub Kalteng Irup HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalteng 2019	4
Gubenur Sugianto Tegaskan Kunci Keberhasilan Bangsa Terletak Pada Kualitas SDM	6
Gubernur : Peningkatan Pendapatan Daerah, Kurangi Ketergantungan Dengan Pusat	7
Gubernur Kalimantan Tengah Sampaikan Sejumlah Poin Usulan Dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024	8
Sekda Kalteng : Indonesia Ikut Aktif Mencegah Meningkatnya Konsentrasi Gas Rumah Kaca	9
Jaksa - ASN Kalteng Gelar Aksi Peduli Karhutla	10
Kepala BNPB : Pencerahan Hubungan Manusia Dengan Alam Semesta Perlu Peran Tokoh Agama	11
Juli 2019, Kalteng Deflasi 0,25 %	12
Pembiayaan Netto dan Belanja Daerah T.A 2019 Alami Kenaikan	12
Sekda Kalteng Lepas Kontingen Pra PON Kalteng 2019	13
Menristekdikti : Keberadaan Rektor Asing, Harus Berkelas Dunia	14
LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI SMA SE-KALTENG 2019	15
Ketua TP-PKK Kalteng : Penanganan Stunting Perlu Intervensi dan Kolaborasi	16
GUBERNUR Kukuhkan Pengurus DPP-APP GMTP Kalteng 2019-2024	17
Gubernur Minta Seluruh Perbedaan Pada Masa Pemilu Dihilangkan	18
Gubernur Dorong Kabupaten di Kalteng Ikuti Jejak Keteladanan Lamandau	19



Grand Design Kalteng 2045 Sasar Pengembangan Potensi dan Keunggulan Daerah

PALANGKARAYA—Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun Master Plan/Grand Design Provinsi Kalimantan Tengah 2045 dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif serta mensinkronkan dan mendukung Visi Indonesia 2045 yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Musrenbangnas tanggal 09 Mei 2019 di Jakarta.

VisiIndonesia2045:Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang ditargetkan Indonesia menjadi Negara Ekonomi terkuat 5 besar dunia dengan 4 Pilar yang perlu diperkuat yaitu 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3). Pemerataan pembangunan. 4) Ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Kalimantan Tengah dengan bermodalkan sumber daya alam yang berlimpah di berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan dan pertanian yang memiliki keunggulan yang berbeda-beda, sangat potensial dalam mendukung pencapaian Visi

Indonesia 2045. "Potensi dan keunggulan daerah ini perlu kita inventarisasi, kita tata dan kita kembangkan. Tentunya hal ini perlu kita ketahui dan kita petakan secara menyeluruh dengan perencanaan yang baik dan berkesinambungan untuk mengembangkan dan mengeolah potensi sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran masyarakat", jelas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat membuka FGD Penyusunan Grand Design Provinsi Kalimantan Tengah 2045 di Palangka Raya (15/08/2019).

Dijelaskannya, berbagai kajian teoritis dan empirik menunjukkan daerah yang berdaya saing adalah daerah yang terus menerus melakukan inovasi. Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimilikinya dengan kewenangan yang lebih luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran daerah.

"Untukitusayamengharapkan dengan adanya Dokumen Grand Design Provinsi Kalteng 2045 itu nanti dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD Provinsi Kalteng 2021-2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 serta

menjadi landasan dan acuan kolaboratif yang selaras dengan program-program strategis daerah berbasis inovasi dan IPTEK, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kalteng", kata Fahrizal.

FGD Penyusunan Grand Design Provinsi Kalteng 2045 juga menjaring berbagai masukan pengalaman dan informasi dari kalangan akademisi, tokoh adat dan mantan pejabat terkait isu strategis yang berhubungan dengan masalah sosial dan kemasyarakatan, hukum, politik dan pemerintahan termasuk kesiapan masyarakat lokal dalam menerima kebijakan pemerintah apabila Ibukota Pemerintahan RI dipindahkan ke wilayah Kalimantan Tengah.

Isu strategis lainnya yang dibahas dalam FGD tersebut terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan, pertambangan dan kehutanan; melemahnya independensi peran Damang Kepala Adat dalam memelihara budaya, situs budaya dan penyelesaian konflik di sekitar wilayah usaha investasi; larangan perladangan dalam memenuhi pangsa keluarga dengan cara pembakaran akibat adanya perubahan iklim dan pemanasan global; kebijakan pembangunan yang berbasis pada masyarakat serta evaluasi pelaksanaan pembangunan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.***



Wagub Kalteng Iru HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalteng 2019.



Palangka Raya - Biro PKP. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan Komandan Upacara Mayor CPM Dedi Wahyu Ismanto yang dilaksanakan di Lapangan Olah Raga Sanaman Mantikei Palangka Raya (17/08/2019).

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang

dihadiri para Veteran/Pejuang, Wredatama, ASN, TNI/Polri, Forkopimda, Pimpinan OPD dan Dinas/Instansi Vertikal Tingkat Provinsi Kalteng, Pelajar dan Mahasiswa itu ditandai dengan Pengibaran Bendera Merah Putih oleh 73 orang Siswa-Siswi SMA terpilih dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng dan Pembacaan Teks Proklamasi oleh Wakil Ketua DPRD Heriansyah, berlangsung tertib, lancar dan hikmad.

Seusai Upacara Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalteng 2019, dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan oleh Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya kepada para pemenang Lomba dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 2019.

Lomba yang diselenggarakan oleh Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalteng 2019 itu antara lain Lomba Kebersihan Kantor dan Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA se-Kalteng, pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik lingkup Pemprov, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta Lomba Desa dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019.

Sebelum Upacara Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang dilaksanakan Pukul : 09.00 WIB di lapangan Sanaman Mantikei Palangka Raya, juga dilaksanakan Upacara Bendera pada Pukul 07.000 WIB di lingkungan Sekretariat Daerah, OPD Provinsi, Instansi Vertikal, OPD Kabupaten/Kota dan di lingkungan SMA/SMK.

Gubernur Kalimantan



Tengah H. Sugianto Sabran dalam sambutannya menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah antara lain yang terkait Bonus Demografi, SDM, Kesehatan dan Gizi.

Mengacudari Data Bappenas, generasi milenial di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 84 juta jiwa atau sekitar 33 % dari 255 juta jiwa penduduk Indonesia saat itu.“Jumlah ini sudah mencapai 50 % dari penduduk usia produktif Indonesia dan jika tidak dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin mebludaknya generasi milenial tersebut bisa menjadi beban demografi, bukan lagi bonus demografi”,beber gubernur Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Upacara Bendera memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan RI 2019 lingkup Setda Kalteng di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti seluruh PNS dan PPPK Setda Kalteng.

Sementara di Kalimantan Tengah berdasarkan Data BPS 2018 tercatat 1.798.040 jiwa adalah penduduk usia produktif atau 69,01 % dan selebihnya usia tidak produktif yakni usia 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas mencapai 30,99 % dari jumlah penduduk Kalteng 2.605.274 jiwa.

Bonus Demografi adalah penduduk dalam usia produktif sangat besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi dalam ekonomi kependudukan dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan semakin besarnya jumlah penduduk produktif sebagai tabungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Namun harus difahami, bonus demografi bagaikan pedang bermata dua. Bisa menjadi berkah dan bisa juga menjadi bencana, tergantung dari kesiapan dan strategi kita dalam menyikapinya”, tegas gubernur.

Apabila penduduk usia produktif yang besar itu tidak berkualitas dan tidak memiliki keunggulan kompetitif, dikhawatirkan meningkatkatnya

berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang akan menambah beban negara.“Oleh karena itu bonus demografi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.Untuk mewujudkan modal manusia yang berkualitas itu memerlukan investasi Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan dan pendidikan”, jelas Sugianto.

Pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan harus menyeluruh mulai dari kuantitas sarana dan prasana hingga kualitas pelayanan termasuk aksesibilitasnya untuk mencapai “SDM Unggul Indonesia Maju” yang mengandung dua pokok pikiran yang saling berkaitan dan bersinergi yaitu “SDM Unggul” dan “Indonesia Maju”.

Berkaitan dengan musim kemarau dewasa ini yang berdampak terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, Gubernur Sugianto Sabran meminta para Bupati/Walikota dan jajaran penyelenggara pemerintahan di daerah agar segera mengaktifkan Poko Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta mencermati dan mewaspadai wilayah-wilayah

yang rawan terjadinya kebakaran melalui deteksi dan pemadaman dini karhutla dengan mengerahkan sumber daya yang ada.

Penyerahan Remisi.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan Remisi Umum secara simbolis kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Palangka Raya, Sabtu sore (17/08/2019)

Narapidana penghuni Lapas Klas II Palangka Raya yang menerima Remisi Umum dalam rangka Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI tahun 2019 ini berjumlah 538 narapidana terdiri dari 524 napi menerima Remisi Umum I dan 14 napi menerima Remisi Umum II

Rangkaian Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kalteng tanggal 17 Agustus 2019 diakhiri dengan malam Syukuran di Istana Isen Mulang Palangka Raya. Syukuran tersebut dihadiri Veteran/Pejuang, Wredatama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pejabat TNI/Polri, Purna dan Anggota Paskibraka 2019.***



Gubenur Sugianto Tegaskan Kunci Keberhasilan Bangsa Terletak Pada Kualitas SDM

PALANGKA RAYA – BIRO

PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah menegaskan pendidikan kepramukaan yang mendasarkan pada Satya dan Dharma Pramuka harus benar-benar tertanam dalam hati setiap insan Pramuka, sebagai pedoman bersikap dan berperilaku.

“Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan karakter kaum muda dan calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia, tentu harus lebih berperan dalam mendidik generasi milenial dewasa ini”, tegas Sugianto Sabran pada Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 sekaligus membuka Perkemahan Wirakarya Daerah Kalimantan Tengah tahun 2019 di Bumi Perkemahan Palangka Kambarariat Tuah Pahoe Palangka Raya, Senin (28/08/2019).

Sugianto Sabran mengatakan pembangunan karakter bangsa menjadi fokus bangsa kita kini dan ke depan. “Pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pembangunan fisik, karena kunci keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas”, ujarnya.

Gerakan Pramuka yang kini sudah berusia 58 tahun tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan. Perlu Rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda dan Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. “Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi. Sebagian besar adik-adik kita

merupakan generasi cyber yang online setiap saat, yang selalu update statusnya dan mengungkapkan kondisi secara realtime dalam media sosial. Pramuka harus keren, gembira, asyik, dan menyenangkan,” tuturnya Sugianto.

Hal ini merupakan tantangan bagi para Pembina Pramuka yang harus selalu kreatif dan berinovasi dalam membina peserta didik sehingga bangga menjadi Pramuka. “Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh jajaran Pramuka di Kalimantan Tengah, utamanya anggota dewasa yang ada di Majelis Pembimbing, Andalan, Pelatih, Pembina, Pamong Saka dan Instruktur agar merapatkan barisan bekerjasama secara sinergis untuk mempercepat mewujudkan kaum muda yang berkepribadian baik, berkarakter, berwatak handal dalam berpikir dan bertindak serta memiliki jiwa Pancasila dan bela negara,” pesan Gubernur.

Dikemukakan, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Badan Nasional Narkotika telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. “Saya berharap kerjasama tersebut ditindaklanjuti oleh jajaran Gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah di tingkat Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting dan Gugus Depan. Karena bahaya narkoba ini sudah menghantui anak-anak dan remaja kita dewasa ini”, jelas Sugianto.

Gubernur mengajak semua elemen harus betul-betul memiliki komitmen bersama untuk melakukan perang melawan narkoba menuju Kalimantan

Tengah bebas dari narkoba.

Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Sugianto Sabran dalam kesempatan tersebut menjelaskan perkemahan Wirakarya Daerah merupakan wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengaktualisasikan potensi individu dan kelompok menuju kemandirian serta mendedikasikannya baktinya sebagai anggota pramuka Penegak dan Pandega yang dikemas dalam berbagai kegiatan antara lain Bakti Sosial, Donor Darah dan Festival Seni Budaya.

Dijelaskannya, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah tahun 2019 telah dan akan mengikuti beberapa kegiatan di tingkat nasional antara lain mengikuti Rakernas Gerakan Pramuka bulan Juni di Cibubur dan Workshop Prasiaga 12 s.d 14 Agustus di Jakarta serta akan mengikuti Kemah Budaya Nasional 25 s.d 30 Agustus 2019 di Padang Sumatera Barat.

Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 itu dihadiri sekitar 2500 orang termasuk peserta Perkemahan Wirakarya Daerah Kalimantan Tengah sebanyak 1200 orang utusan Kwartir Cabang se-Kalteng dan 500 Pramuka Penggalang.

Gubernur Sugianto Sabran selesai Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 tahun 2019, menyematkan Lencana Pancawarsa, Lencana Darma Bakti dan Lencana Melati kepada sejumlah Ketua Kwartir Cabang, Pembina dan Pelatih sebagai penghargaan atas jasa, pengabdian dan kerjasamanya dalam meningkatkan aktivitas gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah. ***

Gubernur : Peningkatan Pendapatan Daerah, Kurangi Ketergantungan Dengan Pusat

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah agar intensif melakukan percepatan penyerapan anggaran khususnya Belanja Langsung sebagai salah satu upaya percepatan realisasi target kinerja pembangunan. "Demikian juga upaya peningkatan Pendapatan Daerah, harus kita lakukan demi kemandirian daerah sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin kecil", tegas Gubernur dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Rakordal Program-Program Pembangunan Provinsi Kalteng Triwulan II Tahun Anggaran 2019 di Aula Serbaguna Bappedalitbang Kalteng, Rabu (07/08/2019).

Kemampuan pemerintah provinsi dalam menggali sumber pendapatan daerahnya masih terbatas. Namun dengan keterbatasan tersebut pemerintah provinsi mampu meningkatkan dan menetapkan nilai APBD tahun 2019 hingga mencapai jumlah Rp. 5,45 triliun yang terdiri Rp. 2,79 triliun Belanja Langsung dan Rp. 2,66 triliun Belanja Tidak Langsung. "Dengan kondisi Kalimantan Tengah tersebut, tentu belum maksimal dalam membangun sarana dan prasarana untuk mensejahterakan rakyat sehingga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk berusaha mencari terobosan dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Daerah guna mengakomodir keperluan dana pembangunan", beber Sugianto Sabran.

Terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi Kalteng itu antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dan Hibah dari pihak ketiga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah dalam meraih beberapa capaian kinerja 3 tahun RPJMD yang terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi antara lain meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan I 2019 sebesar 6,03 % dan semakin mengalami kenaikan pada Triwulan II mencapai 7,67 %.

Kemudian Angka Kemiskinan sampai Maret 2019 berhasil ditekan hingga 4,98 %, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 sebesar 70,42 sehingga pertama kalinya IPM Kalteng masuk dalam kategori Kelompok Tinggi (70 s/d 80), sementara Gini Ratio bulan Maret 2019 sebesar 0,336, lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,382. "Dengan capaian indikator makro di atas, Saya harap dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui sinergitas antara provinsi dengan kabupaten dan kota se-Kalteng," ujar Gubernur.

Sugianto Sabran juga menekankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak yang berkaitan dengan capaian target dan realisasi

pengelolaan keuangan daerah agar bekerja keras menyelesaikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019. Bupati dan Walikota wajib memperhatikan dan mendukung program kegiatan penunjang IPM Provinsi serta wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan karena masih banyak ruas jalan dalam kondisi belum mantap serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang rusak termasuk di sektor kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Selain itu, Bupati dan Walikota juga diminta wajib mengawasi dan melaksanakan Anggaran Desa untuk kegiatan produktif, aktif menjaga dan melakukan pemadaman Karhutla di wilayahnya sehingga tidak meluas, melaksanakan percepatan program kegiatan karena penyerapan anggaran khususnya DAK Fisik dan Dana Desa masih rendah serta mengupayakan pengesahan APBD Perubahan 2019 sesegera mungkin sebelum pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru.

Rakordal yang diikuti Unsur Forkopimda, Bupati dan Walikota se-Kalteng serta Dinas Instansi terkait tersebut bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan menghimpun data realisasi kinerja dan data capaian pembangunan dalam RPJMD 2016 s.d 2021 serta koordinasi tentang rencana percepatan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019.***

Gubernur Kalimantan Tengah Sampaikan Sejumlah Poin Usulan Dalam Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menghadiri Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Balikpapan Kalimantan Timur.

Konsultasi Regional yang dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro tersebut dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI H. A. Hafisz Tohir, Gubernur Kalimantan Timur H.Islan Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lamberi, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H.Rudi Resnawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Gellwinn Daniel Hamzah Yusuf, Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Bupati dan Walikota serta Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019).

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam Konsultasi Regional itu menyampaikan beberapa usulan dan masukan terkait Rancangan Awal RPJMN 2020-2024.

Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 tersebut meliputi pembangunan dan penanganan masalah infrastruktur, energi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, pariwisata, dukungan untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi Ibukota Negara.

Berkaitan dengan masalah infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta

dukungan pemerintah pusat untuk membuka daerah-daerah yang terisolir karena keterbatasan anggaran APBD antara lain dengan membangun pelabuhan samudera dan pengembangan Bandara serta pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional poros selatan dan poros tengah termasuk pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan sumber-sumber produksi guna memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

Demikian juga di sektor energi, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk desa dan pembangunan transmisi pipa gas lintas Kalimantan serta meminta dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan dukungan untuk membantu pengembangan SDM di era revolusi industri 4.0.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus berupaya membangun dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe A dengan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Gubernur Sugianto Sabran dalam Konsultasi Regional tersebut secara spesifik mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan penelitian tanaman jenis BAJAKAH di Kalimantan Tengah dan

Kalimantan Tengah diharapkan menjadi pusat penelitian kanker dan tempat didirikannya Rumah Sakit Pusat Kanker Indonesia.

Di sektor pariwisata, Kalimantan Tengah sangat memerlukan infrastruktur penunjang khususnya pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, dan Pantai Ujung Pandaran yang sangat memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, termasuk peninjauan kembali Perda Nomor : 5 tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam Konsultasi Regional yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tersebut, kembali menyampaikan alasan historis dan beberapa kriteria tentang kesiapan Kalimantan Tengah sebagai Ibukota Negara antara lain Peletakan Tiang Pancang Pembangunan Kota Palangka Raya oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno pada 17 Juli 1957, yang disusul pernyataan resmi Presiden Soekarno agar Palangka Raya menjadi 3 M (Modal dan Model Ibukota Negara yang baru dan Modern). Selain itu, Kalimantan Tengah telah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar di kawasan segitiga emas yakni Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan.

Sugianto Sabran menegaskan kepada peserta Konsultasi Regional tentang kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disertai antusiasme masyarakat yang sangat terbuka menyambut keputusan pemerintahan apabila Ibukota NKRI dipindahkan ke Kalimantan Tengah.***

Sekda Kalteng : Indonesia Ikut Aktif Mencegah Meningkatnya Konsentrasi Gas Rumah Kaca

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim sehingga Indonesia harus ikut aktif bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Indonesia juga turut bertanggung-jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya terhadap masalah perubahan iklim bumi yang dampaknya menimbulkan keprihatian bersama umat manusia. "Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masalah lingkungan global tersebut, Pemerintah Indonesia telah menegeluarkan Undang-Undang RI Nomor :16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim", jelas Sekda Kalteng dalam sambutannya disampaikan Asisten Pembangunan dan Perkonomian Nurul Edy di hadapan peserta Rapat Persiapan Tim Pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca,

Rencana Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Kamis (15/08/.2019).

Salah satu Isi Persetujuan Paris tersebut menyatakan bahwa kewajiban masing-masing negara untuk menyampaikan kontribusinya ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) dan target NDC Indonesia untuk mengurangi emisi dengan upaya sendiri sebesar 29 %, menjadi 41 % jika ada kerjasama internasional."Mitigasi dan adaptasi merupakan dua aspek kegiatan yang digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani dampak perubahan iklim", jelas Sekda Kalteng

Untuk itu diperlukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dengan mengumpulkan data/perhitungan data ke sumber emisi yang meliputi 4 sektor yakni sektor energi, pertanian, kehutanan dan sektor limbah. Inventarisasi Gas Rumah Kaca itu merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi Gas Rumah

Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon.

Selanjutnya Tim Pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca Pemprov Kalteng akan melakukan validasi data masing-masing sektor untuk diinput ke aplikasi online SIGN SMART atau Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Tepat."Saya harapkan partisipasi aktif peserta Rapat Persiapan Tim pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca sehingga outputnya dapat tersusun Dokumen Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Mitigasi dan perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dapat tercapai", tutup Sekda.

Rapat Persiapan Tim pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca itu bertujuan meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengetahuan Tim dalam proses pengumpulan data dari masing-masing sektor dan membangun semangat serta komitmen di antara Tim Pelaksana Inventarisasi Gas Rumah Kaca dalam menyiapkan data yang diperlukan sehingga proses pengumpulan data bermanfaat untuk pelaporan data secara online berbasis SIGN SMART.***



Jaksa - ASN Kalteng Gelar Aksi Peduli Karhutla



Palangka Raya – Biro PKP. Jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Jaksa Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya di kota Palangka Raya serta mengajak partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat menyambut baik dan mendukung penuh Aksi Jaksa-ASN Peduli Karhutla tersebut. “Kami mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, berkenaan dengan pada hari ini kita melakukan aksi Jaksa dan ASN Peduli Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mengikutsertakan ASN di lingkungan provinsi dan kota Palangka Raya”, kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri usai mengikuti Salat Istiqqa di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi, Rabu pagi (14/08/2019).

Rangkaian aksi kepedulian

karhutla tersebut diawali dengan apel dilanjutkan dengan salat istiqqa dan doa lintas agama untuk memohon hujan serta penyuluhan hukum keliling dan aksi pemadaman karhutla di sejumlah titik kebakaran di Palangka Raya. Kegiatan itu melibatkan sekitar 80 orang Jaksa dan 1.000 orang ASN dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan ASN Kota Palangka Raya.

Sekda Kalteng berharap aksi kepedulian ini dapat menggugah peran serta aktif masyarakat untuk turut mencegah dan menanggulangi karhutla. “Karhutla ini tanggung jawab kita bersama, kita semua yang merasakan

dampaknya, tidak terkecuali. Kita berharap partisipasi dari masyarakat nantinya, khususnya masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Kita harapkan dengan aksi gerak bersama ini, bencana karhutla di Kalteng terutama di kota Palangka Raya, bisa segera hilang”, kata Fahrizal Fitri.

Lokasi yang menjadi sasaran pemadaman karhutla antara lain ke arah Kalampangan dan sekitar Jl. G. Obos yang sudah diidentifikasi oleh BPB-PK Kalteng.

Hal senada juga dikemukakan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Adi Sutanto seraya mengajak seluruh warga masyarakat Kalteng agar turut serta berpartisipasi dalam penanganan karhutla melalui aksi peduli karhutla. “Saya mengajak kita semua bersama-sama melakukan apa yang kita bisa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Bila kita melihat di sekitar kita muncul titik api, jangan dibiarkan sampai membesar dan menunggu dinas terkait memadamkannya”, imbuhnya.

Masyarakat tidak boleh masa bodoh, tetapi harus memiliki inisiatif dan kepedulian yang tinggi dalam menanggulangi karhutla. “Dengan sarana yang ada di sekitar kita, hendaknya kita berusaha untuk ikut memadamkannya. Kepedulian seperti inilah yang kita harapkan tumbuh di tengah masyarakat,” tandas Adi Sutanto.***



Kepala BNPB : Pencerahan Hubungan Manusia Dengan Alam Semesta Perlu Peran Tokoh Agama

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Upaya penanggulangan dan panganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan Tengah terus dilakukan dengan meningkatkan sinergitas Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. 8 Kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng telah menetapkan status siaga darurat dan melakukan penanganan Karhutla secara intensif.

Komandan Korem 102/Pjg Kolonel Armed Saiful Rizal selaku Komandan Satuan Tugas Gabungan Penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah mengemukakan kondisi tersebut pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan provinsi Kalteng di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Minggu pagai (4/8/2019).

Rakor Penanganan Karhutla di Kalteng tersebut diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Kapolres Palangka Raya, Walikota Palangka Raya, Plt. Kepala BPBD-PK Kalteng dan Jajaran BPBD Kabupaten dan Kota se-Kalteng beserta sejumlah Pimpinan Dinas/Instansi terkait.

Kepala BNPB Doni Monardo menekankan kehadirannya untuk memompa semangat jajaran pemerintah daerah dan TNI/Polri beserta komponen masyarakat di Kalteng dalam penanganan masalah Karhutla sekaligus mendorong upaya pencegahan antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Satgas Gabungan dan pelibatan

masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dengan memgembangkan tanaman yang memiliki nilai ekonomis. "Jika ekonomi membaik, maka masyarakat akan menjaga wilayah-wilayah mereka agar tidak terbakar. Jangan mau dibayar pihak manapun (untuk membakar lahan)," tegas Doni Monardo.

Kepala BNPB tersebut juga menyatakan pentingnya melibatkan peran serta para tokoh agama untuk meluangkan waktu dalam peribadatan masing-masing agar memberikan pencerahan tentang bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam semesta.

Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan apresiasi pemerintah Provinsi kepada BNPB yang telah membentuk dan menempatkan 1.512 personel Satgas Gabungan pencegahan Karhutla di 100 Desa/Kelurahan yang tingkat kerawannya sangat tinggi terjadi Karhutla. Satgas tersebut didukung dengan 6 unit helikopter water bombing

dan 1 helikopter patroli.

Sugianto Sabran mengatakan strategi Kepala BNPB yang menitikberatkan pada upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dengan menempatkan personil di desa-desa atau kelurahan rawan Karhutla dirasa sudah tepat mengingat luas Kalteng 1,5 kali pulau Jawa ini memiliki lahan gambut sekitar 3 juta hektar dengan tingkat kepadatan penduduknya hanya 17,3 jiwa/km².

Berkaitan dengan penganggaran disarankan menggunakan sistem dana kontijensi. "Jika memungkinkan menggunakan sistem Dana Kontijensi, bukan dana darurat seperti selama ini. Meskipun belum ditetapkan status keadaan darurat, kegiatan Satgas Gabungan pencegahan Karhutla sudah bisa dilaksanakan dan strategi pencegahannya bisa dilaksanakan secara optimal", beber gubernur.

Diharapkan ke depannya sinergitas pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media masa akan mampu mewujudkan komitmen bersama Kalteng Bebas Kabut Asap 2019.***



Juli 2019, Kalteng Deflasi 0,25 %

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah bulan Juli mengalami deflasi di level 0,25 % (mtm), lebih rendah atau menurun dibanding inflasi Juni di level 0,14 % (mtm), berada di bawah rerata historis 3 tahun ke belakang pada periode yang sama yaitu inflasi 0,08% (mtm). Capaian inflasi Kalteng juga lebih rendah dibanding nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm). Komoditas penyumbang deflasi Juli adalah kelompok volatile food maupun administered price yang terjadi di Palangka Raya dan Sampit.

Inflasi periode mendatang diperkirakan akan ada tekanan di kelompok volatile food karena musim kemarau akan terjadi gangguan produksi pada beberapa tanaman hortikultura dan perayaan Idul Adha bulan Agustus yang akan mempengaruhi konsumsi beberapa komoditas. Kelompok administered price diperkirakan tarif angkutan udara mengalami penurunan seiring dengan berjalannya kebijakan Kementerian Perhubungan dan kelompok Core diperkirakan terjadi kenaikan harga emas dunia dan Perayaan HUT RI.

Sebagian besar kota sampel inflasi di pulau Kalimantan bulan Juli mengalami deflasi. Kota Sampit dan kota Palangka Raya mengalami deflasi relatif tinggi se-regional dan deflasi di

Kalimantan Tengah juga tertinggi dan menempati peringkat dua se-Kalimantan.

“Berdasarkan hasil pemantauan kami, per 1 Agustus harga-harga pangan di pasar menunjukkan pergerakan yang variatif untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok rata-rata mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan dan ada juga yang mengalami penurunan”, ungkap Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Perwakilan Kalimantan Tengah Setian selaku Wakil Ketua TPID Kalteng pada Press Release TPID Bulan Juli di Palangka Raya, Jumat (02/08).

Tim TPID bersama Dinas-Dinas terkait telah menyusun rencana aksi untuk mengendalikan inflasi di Kalteng. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berfokus pada komoditas daging ayam ras yang harganya sedikit mengalami peningkatan, namun masih dalam batas kewajaran. Komoditas berbagai cabai juga perlu pemantauan selama sebulan ke depan karena pasokan cabai dari Makassar kemungkinan akan terdampak oleh gelombang air laut tinggi di bulan Agustus.

Dinas Pertanian juga telah melakukan program pembagian 1.500 polybag bibit cabai selama bulan Juli untuk menopang produksi cabai serta mendukung capaian inflasi, sedangkan

kandang ayam penyangga masih menunggu pasokan DOC sehingga masa panennya diperkirakan bulan September.

Demikian juga Dinas ESDM memastikan pasokan elpiji untuk bulan Agustus dari Balikpapan terpantau aman yang didukung koordinasi Dinas ESDM bersama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan skema penyaluran elpiji melalui BUMDES.

Dinas Perikanan pun memastikan pasokan ikan dari kolam penyangga tetap aman. Namun suplai ikan sungai, ikan tangkapan dan ikan laut akan bergantung pada musim dan kondisi cuaca. Biasanya ikan sungai pada musim dapat dipanen dalam jumlah besar. Saat ini, ikan-ikan dari kolam penyangga di Tangkling sebulan sekali dijual pada car free day dan di pasar penyeimbang terutama ikan lele, nila dan patin.

Selain itu, ketersediaan stok beras BULOG terjaga pada kondisi aman dengan ketahanan stok mencapai 8 bulan atau sebanyak 8.258 ton sedangkan daging kerbau 4 ton, minyak goreng 90.174 liter, dan gula pasir 119 ton.

Demikian juga BMKG terus melakukan pemantauan rutin tentang kondisi musim dan cuaca yang diinformasikan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai masukan dan rujukan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bidang ekonomi.***

Pembiayaan Netto dan Belanja Daerah T.A 2019 Alami Kenaikan

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Kalimantan Tengah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Wakil Ketua Dewan H.Heriansyah, Senin (12/08/2019).

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menjelaskan beberapa target pembangunan daerah.

“Target atau sasaran indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 pada KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2019 meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,8 - 6,2 %; Laju Inflasi 2,9 - 3,3 %; Angka Kemiskinan 4,8 %; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,0 %; Gini Ratio 0,336; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,42 %”, ungkap gubernur.

Gubernur menambahkan, perubahan asumsi dasar kebijakan umum tahun 2019 menunjukkan Pendapatan Daerah pada KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 4,296 % dibandingkan Target Pendapatan pada APBD tahun 2019 sebesar 5,147 triliun rupiah menjadi 4,926 triliun rupiah.

Untuk pembiayaan netto mengalami kenaikan 124,61 %, yakni dari defisit Rp. 308 miliar rupiah lebih menjadi defisit 693 miliar rupiah lebih. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.308 miliar rupiah lebih, mengalami kenaikan 126,23 % menjadi Rp.698 miliar pada APBD tahun anggaran 2019.

Sementara itu, Belanja Daerah pada KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.163 miliar rupiah atau 3 % dibandingkan Anggaran Belanja Daerah pada APBD tahun 2019 yakni dari Rp. 5,456 miliar rupiah lebih menjadi Rp. 5,619 miliar rupiah lebih.***

Sekda Kalteng Lepas Kontingen Pra PON Kalteng 2019.

PALANGKARAYA—Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan 316 atlet, 79 pelatih, 53 official dan 35 orang manager untuk mengikuti Pra PON 2019. Kontingen Kalimantan Tengah sebanyak 483 orang yang berlaga pada 36 cabang olahraga dalam Pra PON XX Tahun 2019 tersebut secara resmi dilepas oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat pagi (02/08/2019).

Ke-36 Cabang Olah Raga Pra PON XX Tahun 2019 itu diselenggarakan tersebar di seluruh Indonesia dan Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi tuan rumah Pra PON XX untuk cabang Bulutangkis dan Catur.

“Pra PON merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana pencapaian dan pembinaan olahraga prestasi di masing-masing provinsi sekaligus menjadi syarat penentuan cabang olahraganya yang lolos PON Ke-20 di Papua Tahun 2020. Rangkaian Pra PON XX Tahun 2019 berlangsung sejak April sampai dengan Desember 2019”, ungkap Kepala Dispora Kalteng Falery Tuwan selaku Ketua Satuan Pelaksana Pra Kualifikasi PON Kontingen Provinsi Kalimantan Tengah 2019.

Falery Tuwan juga menjelaskan, Kontingen Kalimantan Tengah telah mengikuti 6 cabang olahraga masing-masing bola basket, softball/baseball, balap sepeda, menembak, renang kolam dan golf, sedangkan atlet Kalteng lainnya masih berjuang di cabang atletik dan sepak takraw

untuk meraih tiket PON Ke-20 di Papua.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menyadari prestasi olahraga Kalteng saat ini kurang menggembirakan. “Saya meminta perhatian kepada Dispora dan Pengurus Provinsi cabang olahraga serta pemangku kepentingan lainnya agar bersinergi dan bekerja keras meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional”, tegas Gubernur Sugianto.

Ia pun berpesan kepada Dispora dan Satlak Pra PON untuk mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan Pra PON untuk seluruh cabang olahraga, dukungan fasilitas dan semangat untuk meraih prestasi terbaik, lolos PON ke-20 di Papua.

“Loloslah ke PON dengan menjadi juara. PON tahun depan akan dilaksanakan di Provinsi Papua, sudah tentu memerlukan anggaran yang besar sehingga dapat saya katakan PON ke-20 adalah PON prestasi, bukan sekadar partisipasi mengirimkan atlet tanpa prestasi. Cabang olahraga yang diberangkatkan

adalah yang lolos Pra PON dengan menjadi juara dan mempunyai peluang besar untuk memperoleh medali”, ungkap Gubernur Kalteng tersebut optimis.

Pra PON juga menjadi sarana untuk mempererat dan membangun tali silaturahmi, rasa kesetiakawanan, persatuan dan kesatuan sesama atlet se-Indonesia. “Keberhasilan Pra PON akan membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga akhirnya akan terwujud Kalteng Berkah, masyarakat sehat, adil, makmur dan sejahtera”, pungkas Sugianto Sabran berpesan.

Pelepasan Kontingen Pra PON XX Kalteng 2019 dilakukan sebelum senam pagi bersama yang diikuti Ketua TP PKK Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Sekda Kalteng, Ketua Satuan Pelaksana Pra Kualifikasi PON Kontingen Provinsi Kalteng Tahun 2019, Kontingen Pra PON Kalteng Tahun 2019, sejumlah Pejabat Provinsi dan Anggota Forkopinda Kalteng, Perwakilan KONI, Ketua Pengurus Provinsi Cabang Olahraga se-Kalteng, serta para ASN Lingkup Pemprov Kalteng.***



Menristekdikti : Keberadaan Rektor Asing, Harus Berkelas Dunia.

PALANGKA RAYA –Biro PKP. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Profesor H.Mohamad Nasir membuka resmi Rakornas Ke-XIV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) 2019 di Aula Institut Agama Hindu Negeri Palangka Raya, Jumat pagi (30/08/2019).

Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir dalam sambutannya menekankan peran milenial dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan kualitas menejemen pendidikan nasional di Indonesia. Disebutkan era tahun 70'an banyak dosen Indonesia menjadi dosen Universitas di negara tetangga dan banyak mahasiswa dari negara tetangga menempuh pendidikan di Indonesia, namun era tahun 90'an terjadi pergerakan dan pergeseran menejemen maupun kualitas pendidikan di negara-negara tetangga mulai meningkat.

"Perguruan Tinggi di negara tetangga mengadopsi dosen-dosen yang berasal dari berbagai negara seperti Singapore, Amerika, Australia, India maupun Eropa. Perguruan Tinggi mereka meningkat lebih baik, orang Indonesia berbondong-bondong kuliah ke luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Hal inilah yang dapat dijadikan contoh untuk kita lakukan dalam upaya melakukan perubahan", ungkap Nasir.

Menristekdikti Profesor Nasir menargetkan kedepannya terdapat dua atau lima Perguruan Tinggi Negeri yang bisa masuk kelas dunia dan untuk itu perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nasir juga menjelaskan keberadaan Rektor Asing. "Paling tidak, masyarakat dikenalkan dengan era globalisasi dan tidak bisa membendung diri sendiri. Rektor asing pada suatu Perguruan Tinggi yang diangkat adalah yang mempunyai reputasi kelas dunia. Sebagai contoh tahap awal yang akan dilakukan mendatang adalah memasukan Direktur Keorganisasian dari warga negara asing di suatu Perguruan Tinggi. Kriteria yang ditentukan adalah Rektor WNA yang memiliki networking kelas

dunia dan bisa mendatangkan para guru besar asal luar negeri ke Indonesia, berkolaborasi dalam hal riset, berkolaborasi dalam inovasi, dan bahkan bisa menghasilkan revenue", beber Nasir.

Era masa lalu dikenal dengan konvensional, sedangkan masa kini dikenal dengan Era digital dan modern yang menjadikan komunikasi berbasis digital menggunakan handphone, memudahkan komunikasi dalam penyampaian informasi atau berita menjadi lebih cepat dan efisien. "Perkembangan semacam ini yang menjadi sangat penting adalah bagaimana cara yang baik dan bijak bagi kita untuk mengenalkan era digital dan teknologi ini kepada para mahasiswa ,," tegas Menristekdikti tersebut.

Indonesia memiliki potensi yang besar sehingga memerlukan perubahan pada generasi mudanya seperti mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi. Nasir mengungkapkan, kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara berada di tangan generasi muda yang merupakan calon pemimpin negeri di masa depan.

"Anak-anak milenial ini harus kita dorong terus untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Demikian juga persatuan dan kesatuan harus benar-benar diga, sangan sampai cerai bera", tegas Nasir.

Kemenristekdikti akan meluncurkan program yang dinamakan Talent Scouting, yaitu mencari anak-anak Indonesia yang berkualitas dan akan dididik menjadi ahli computer science. Anak-anak tersebut nantinya bisa mengambil Ph.D pada perguruan tinggi yang terbaik di dunia. "Tahap awal akan dicari 100 orang anak Indonesia", beber Nasir.

Menristekdikti Nasir mengharapkan Rakornas tersebut mampu melahirkan dan menemukan inovasi-inovasi baru dan tetap menjaga dan merawat keutuhan NKRI. "Tetap berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam membina dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai

Dasar Negara, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus kita pertahankan terus sampai kapanpun kita rawat bersama. Jangan kita lihat perbedaan, mari jaga persatuan dan kesatuan", pesan Menristekdikti tersebut.

Sementara itu Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakil Gubernur Kalteng pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya Rakornas Ke-XIV KMHDI 2019 seraya berharap agar KMHDI juga turut mempersiapkan generasi penerus yang mempunyai daya saing atau keunggulan kompetitif dalam rangka menyongsong dan menjawab tantangan global untuk berpartisipasi membangun Indonesia dan Kalimantan Tengah ke depannya menjadi lebih baik.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menegaskan kondisi Kalteng yang kondusif ini harus dipelihara dan dijaga dengan baik. "Selama ini kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah sangat baik dan tidak pernah terjadi gejolak yang mengkhawatirkan, kondisi ini hendaknya senantiasa dipertahankan terus dan selalu ditingkatkan agar kehidupan masyarakat kita senantiasa merasa aman dan damai", tegas Sugianto.

Sugianto Sabran juga menyampaikan apresiasinya terhadap Umat Hindu di Wilayah Kalimantan Tengah yang telah memberikan kontribusi positif dalam rangka menjaga, memelihara serta merawat kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah bangsa yang majemuk. "Saya mengharapkan kepada Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas dan mutu diri masing-masing, dalam rangka bersama-sama meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia di Kalimantan Tengah menjadi lebih baik, maju dan bermartabat", kata Gubernur Sugianto Sabran sekaligus menegaskan Program Pendidikan dan Kesehatan adalah salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di samping program-program yang lain.***

LOMBA TANGKAS TERAMPIL KOPERASI SMA SE-KALTENG 2019

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pengetahuan tentang Perkoperasian akan lebih baik jika diberikan sedini mungkin kepada generasi muda melalui sektor pendidikan mulai tingkat SMP dan SMA bahkan sampai tingkat Perguruan Tinggi. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan sudah dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat melalui usaha perkoperasian bidang produksi dan jasa dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dengan harapan Koperasi di Kalimantan Tengah menjadi sokoguru di daerahnya.

Gubernur Kalimantan Tengah mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya, Jumat (16/19)

Perkoperasi di Kalimantan Tengah terus mengalami perkembangan dan jumlahnya hingga Juli 2019 tercatat 2.388 unit. "Melihat perkembangan Koperasi di Kalimantan Tengah, sudah saatnya lah kita berbenah untuk menjadikan Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya", kata gubernur.

Gubernur berharap melalui

Lomba Tangkas Terampil Koperasi Tingkat SMA/Sederajat se-Kalteng ini dapat menambah wawasan dan mengenalkan ilmu perkoperasian kepada anak sejak dini. Hal ini membantu siswa mengenal manfaat berkoperasi dalam hal sikap gotong royong dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan dan pengenalan terkait dunia bisnis, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab.

Selain itu untuk melatih kemampuan dan sikap saling bekerja sama, belajar mengelola suatu usaha, membiasakan siswa agar gemar menabung serta melatih kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. "Perlu menjadi perhatian bahwa Koperasi adalah Badan Usaha sehingga memerlukan keseriusan dalam mengelolanya sebagai

lembaga ekonomi atau lembaga bisnis. Mari kita kembangkan koperasi yang ada agar mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya", ujar Sugianto.

Ditegaskannya, memberdayakan koperasi dengan memberikan pembinaan bagi generasi muda adalah tanggung jawab bersama agar kegiatan usahanya kelak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi anggota, masyarakat dan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Lomba Tangkas Terampil Koperasi SMA/Sederajat se-Kalimantan Tengah 2019 itu dilaksanakan 3 hari sejak tanggal 15 s.d 17 Agustus 2019 diikuti 65 orang peserta berasal dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, minus Kabupaten Sukamara.***



Ketua TP-PKK Kalteng : Penanganan Stunting Perlu Intervensi dan Kolaborasi

Palangka Raya-Biro PKP. Sekitar 350 orang Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berprestasi dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah turut serta dalam Jambore Kader PKK Ke-6 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Agustus 2019 di Palangka Raya.

Jambore Kader PKK itu meliputi lomba defile, penyuluhan pelaksanaan 10 program pokok PKK, senam kreasi, seminar tentang publik speaking dan capacity building serta fashion show khusus pesertanya para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Kalteng, diselenggarakan di Hotel Bahalap Palangka Raya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Nyonya Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran mengatakan Jambore Kader PKK 2019 ini bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan, memberikan penghargaan atas prestasi kepada para kader dan memotivasi kader PKK untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera serta meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan di antara para kader PKK se-Kalteng. "Gerakan PKK juga bertujuan mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat sejahtera, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatnya kesadaran hukum dan lingkungan", beber Yulistra Ivo Sugianto Sabran pada pembukaan Jambore Kader PKK 2019 di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Rabu sore (28/08/2019).

Ketua TP – PKK Kalteng juga takhenti-hentinya mengajak semua pihak agar peduli dan menangani permasalahan stunting secara serius. Jambore Kader PKK 2019 mengusung tema "Pencegahan dan penanggulangan Stunting Melalui Pemberdayaan Keluarga" merupakan salah satu program prioritas TP-PKK secara nasional.

Disebutkan, stunting merupakan permasalahan kesehatan yang meresahkan di Indonesia termasuk bagi Kalimantan Tengah dengan angka 34,04 % pada tahun 2018, namun masih berada di atas angka nasional yakni 30,8 %. "Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani sesegera mungkin dengan intervensi dan kolaborasi bersama lintas sektor", tegas Yulistra Ivo Azhari.

Sehubungan dengan upaya penanganan stunting tersebut, maka peran kelompok Dasawisma sebagai kelompok terkecil dalam gerakan PKK sangat penting. "Pada kelompok Dasawisma inilah diharapkan munculnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat terhadap masalah dan kemungkinan munculnya penyakit yang mengancam dan merugikan masyarakat", imbuh Yulistra Ivo.

Selain Dasawisma, peran Posyandu juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting karena Posyandu merupakan ujung tombak layanan dasar sosial di lingkungan masyarakat.

Namun persentase Posyandu yang aktif atau Posyandu yang mempunyai strata Mandiri dan Purnama di Kalteng hingga tahun 2019 hanya 25,39 % atau 651 Posyandu dari 2.564 Posyandu yang ada di Kalimantan Tengah. "Untuk itu saya mengajak masyarakat agar meningkatkan keaktifannya dan bersama-sama membina Posyandu di daerahnya masing-masing termasuk peran kader PKK dalam mengajak ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui

supaya aktif membawa balitanya ke Posyandu guna mendapatkan pelayanan imunisasi dan pemantauan tumbuh-kembang anaknya, sangat diperlukan", jelas Ketua TP-PKK Kalteng tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di hadapan peserta Jambore Kader PKK Provinsi Kalteng 2019 mengharapkan Jambore tersebut bermanfaat bagi pembinaan dan penguatan institusi keluarga. Kader PKK juga harus memperhatikan tiga hal penting dalam kehidupan keluarga yaitu kesehatan, kecerdasan dan pintar mengatur ekonomi keluarga. "Menciptakan keluarga sejahtera merupakan inti penting dalam setiap kegiatan PKK. Ciptakan keharmonisan dalam keluarga sebab keluarga merupakan pondasi kehidupan kita", kata Sugianto.

Melalui Jambore Kader PKK ini diharapkan akan terbangun rasa saling menyatukan kekuatan dan memperkuat komitmen untuk menjalankan program kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam 10 program pokok PKK. "Semua program pokok PKK ini adalah landasan menuju keluarga sejahtera sesuai tujuan pembangunan milenium yang selaras dengan tujuan kita bersama menuju Kalteng BERKAH", tutup gubernur Kalteng Sugianto Sabran***



GUBERNUR KUKUHKAN PENGURUS DPP-APP GMTP KALTENG 2019-2024

PALANGKA RAYA – BIRO

PKP. Kita patut berbangga bahwa Bangsa Indonesia memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang besar dan luas ini. Para pendiri bangsa telah mewujudkan konsepsi dan konsensus Kebangsaan dan Kenegaraan tersebut dengan Dasar Negara Pancasila, Konstitusi Negara UUD 1945, Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Nasional. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya yang terdiri dari 1.128 suku, 652 bahasa daerah serta beragam agama dan budaya.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran kembali mengingatkan hal itu setelah mengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Mandau Talawang Pancasila (DPP-APP GMTP) Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang Palangka

Raya, Rabu Siang (14/08/2019).

GMTP merupakan gerakan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang turut berjuang melepaskan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, namun tetap berada dalam Bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1957, Provinsi Kalimantan Tengah secara de facto terpisah dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibu Kotanya Palangka Raya dan dalam perkembangan selanjutnya generasi penerus perjuangan membentuk DPP Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Mandau Talawang Pancasila Kalimantan Tengah tahun 1998 yang berpusat di Palangka Raya.

Gubernur Sugianto Sabran meminta perhatian segenap pengurus Ormas agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI, memelihara nilai agama, budaya,

moral, etika dan norma kesusastraan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, Ormas harus menjaga ketertiban umum dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 tahun 2013 Pasal 21 tentang Kewajiban Ormas.

“Oleh karena itu Pengurus Ormas dan LSM diharapkan mempunyai rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi di segala kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut” tegas Gubernur.

Sugianto Sabran juga mengharapkan kepada segenap Pengurus DPP-APP GMTP yang telah dikukuhkan agar mampu membangun suasana harmonis dan demokratis dengan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian potensi konflik internal organisasi dapat diminimalisir dan dapat bersinergi dengan pemerintah sebagai mitra dalam percepatan pembangunan di segala bidang, menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial tanpa memandang etnis dan golongan serta dapat mendukung proses pembauran kebangsaan dan memantapkan persatuan dan kesatuan antar seluruh elemen bangsa.

Ketua Umum DPP-APP GMTP Periode 2019-2024 itu Iber H. Nahason dan Sekretaris Jenderal M.Leiden serta Bendahara Umum Kristiana Djojoatmojo dan sejumlah Ketua-Ketua Departemen.***



Gubernur Minta Seluruh Perbedaan Pada Masa Pemilu Dihilangkan



PALANGKA RAYA—Biro PKP. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Palangka Raya Periode 2019-2024 dilantik dan diambil Sumpah/Janjinya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya di Gedung DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (14/8/2019).

Pengucapan Sumpah/Janji ke-30 Anggota Dewan Kota tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya Periode 2014-2019 Sigit Karyawan Yunianto sebagai Pimpinan Papat serta dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Periode 2014-2019 Ida Ayu Nia Anggraini, Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Wakil Walikota Palangka Raya Umi Mastikah, mantan Walikota Palangka Raya Periode 1993-1998 Nahson Taway dan mantan Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2003-2008 Saily Mochtar serta mantan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya Yurikus Dimang.

Sigit Karyawan Yunianto terpilih sebagai Pimpinan Sementara DPRD Kota Palangka Raya sambil menunggu pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya yang definitif untuk Periode tahun 2019-2024.

Gubernur Kalimantan

Tengah dalam sambutan yang dibacakan Walikota Palangka Raya berharap pelantikan tersebut sebagai momentum mengawali kinerja DPRD Kota Palangka Raya. "Pelantikan ini menjadi momentum mengawali kinerja DPRD Kota Palangka Raya untuk pengabdian kepada masyarakat Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan dan menjaga amanah yang telah diberikan sekaligus meningkatkan

kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya", jelas Sugianto Sabran

Pemilihan umum anggota legislatif 17 April 2019 lalu dinilai baik dan sukses, namun Gubernur tetap meminta agar seluruh perbedaan yang terjadi pada masa-masa pesta demokrasi tersebut dihilangkan. "Mari kita satukan langkah, menyatukan visi dan misi sebagaimana harapan seluruh masyarakat," tegas Gubernur.

Sugianto Sabran juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. "Selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kalimantan Tengah," imbuhnya.***



Gubernur Dorong Kabupaten di Kalteng Ikuti Jejak Keteladanan Lamandau

NANGA BULIK Kalteng – Biro PKP. Kabupaten Lamandau memasuki usia Ke-17 tahun telah menorehkan sejumlah prestasi antara lain memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2018 dari BPK RI, Tertib dan Tepat Waktu dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sehingga meraih Peringkat I tahun 2015, Peringkat III tahun 2016 dan Peringkat I Tingkat Provinsi Kalteng tahun 2017.

Kabupaten Lamandau tahun 2018 juga berhasil meraih penghargaan Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan menyandang predikat Kabupaten Layak Anak bersama Kabupaten Katingan. "Saya mendorong Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk mengikuti jejak keteladanan yang telah dirintis oleh Kabupaten Lamandau," tegas Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Wagub Habib Ismail Bin Yahya ketika menghadiri Peringatan Ulang Tahun Ke-17 Kabupaten Lamandau tahun 2019 di Nanga Bulik, Rabu (7/8/2019).

Gubernur juga mengajak masyarakat bekerja keras dan bergerak cepat untuk menciptakan inovasi dengan sumber daya yang ada. "Saya mengajak seluruh masyarakat di daerah ini untuk terus bekerja keras dan bergerak cepat melaksanakan perubahan dalam membangun dan melahirkan inovasi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang ada," kata Gubernur.

Pada Peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Lamandau tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan dan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk penyerahan Kartu Kalteng BERKAH kepada 4.852 warga.



Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamandau 2019 yang dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kalteng H.Hamdani dan Wakil Gubernur Kalteng Periode 1986-1991 Victor Phaing, Bupati dan Wakil Bupati se-Kalteng, Forkopimda, DPRD dan Jajaran SOPD setempat itu dimeriahkan dengan penampilan tarian pedalaman dan pesisir "Bahaum Bakuba" oleh sanggar tari Sebayan Tujuh, fashion show batik Kabupaten Lamandau dan pemecahan rekor MURI makan "Coto Keladi Korup Matah" secara serentak dengan peserta terbanyak. Sertifikat MURI untuk Rekor 2.780 mangkok coto atau soto ini diserahkan Senior Manager MURI Ariani Siregar kepada Bupati Lamandau H. Hendra Lesmana.

Tekan Angka Kejadian Stunting Jadi PR TP PKK di Kalteng

Angka prevalensi stunting Balita usia 0-59 bulan di provinsi Kalimantan Tengah relatif masih tinggi sekitar 34 %. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kelompok Kerja (Pokja) IV Provinsi Kalimantan Tengah dr.M. Fitriyanto mengatakan meski tergolong

rendah, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lamandau masih berada di atas 20 %. "Berdasarkan data Riskesdas, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lamandau mencapai 25,3 % pada tahun 2013 dan 28,34 % pada tahun 2018", beber dr. M. Fitriyanto.

Hal tersebut disampaikan Fitriyanto di sela kegiatan Sinergitas TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah dengan TP PKK Kabupaten Lamandau di Aula Badan Keuangan Kabupaten Lamandau. Fitriyanto juga mengungkapkan bahwa stunting meliputi tiga pola yakni pola asuh, pola sanitasi dan pola makan. "Menjadi PR bagi TP PKK untuk menekan angka kejadian stunting di Provinsi Kalimantan Tengah," imbauinya.

Sinergitas TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten Kota sangat penting untuk mengatasi kejadian stunting melalui perbaikan gizi anak-anak dengan makanan yang dihasilkan dari rumah seperti kelor, katuk atau keladi. Sharing juga dinilai perlu dilakukan karena keaktifan Posyandu di Bumi Tambun Bungai masih relatif rendah yakni hanya sekitar sekitar 19 %***

